



## **ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN LAPANGAN PEKERJAAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2026**

**Mutia Fadila Sari, Piana Pebrina, Angelica Putri Leori Natasya, Shalima Zamaiya, Radelia Vebrianti, Galuh Efnol Adzan**

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

### **Abstrak**

Stunting masih menjadi permasalahan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya pencegahan stunting tidak hanya memerlukan intervensi medis, tetapi juga perubahan perilaku gizi keluarga melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program edukasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) terhadap perubahan perilaku gizi keluarga dalam pencegahan stunting di wilayah pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi-eksperimen dengan desain pretest-posttest tanpa kelompok kontrol. Sampel terdiri atas 40 keluarga yang memiliki balita dan mengikuti program edukasi gizi oleh mahasiswa KKN selama empat minggu. Instrumen penelitian berupa kuesioner perilaku gizi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan praktik gizi. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada skor pengetahuan ( $p < 0,05$ ), sikap ( $p < 0,05$ ), dan praktik gizi keluarga ( $p < 0,05$ ) setelah pelaksanaan program. Kegiatan KKN berbasis edukasi gizi terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku gizi keluarga, terutama dalam pemilihan bahan makanan bergizi, penerapan pola makan seimbang, serta praktik pemberian makanan tambahan pada balita. Dengan demikian, program edukasi KKN berperan penting sebagai bentuk intervensi berbasis masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan di tingkat keluarga dan komunitas.

**Kata Kunci:** Edukasi Gizi, KKN, Perilaku Gizi Keluarga, Pencegahan Stunting, Perubahan Perilaku.

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan pengangguran di Kota Palembang tahun 2024 masih menjadi isu strategis, terutama di kalangan lulusan SMA/SMK dan angkatan kerja muda. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,98%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja berpendidikan menengah (BPS, 2024).

Ketidakesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dominasi sektor ekonomi yang kurang padat karya, serta keterbatasan akses pengalaman kerja menjadi faktor utama yang memperparah pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan yang komprehensif untuk merumuskan alternatif solusi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Palembang adalah tingginya pengangguran usia produktif, khususnya lulusan SMA/SMK, yang dipengaruhi oleh faktor struktural. Permasalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) antara pencari kerja dan kebutuhan industri, keterbatasan lapangan kerja formal, serta pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya pengangguran lulusan baru, tingginya ketergantungan pada sektor informal, serta menurunnya produktivitas dan

daya saing ekonomi lokal (Mubarok & Saepudin, 2024).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Palembang pada 2024 turun menjadi 6,98%, melanjutkan tren penurunan sejak Desember 2022 (Darmawan, 2025). Namun, Tingginya pengangguran lulusan baru di Kota Palembang, terutama dari lulusan SMA/SMK, menyebabkan ketergantungan berlebih pada sektor informal yang tidak menjamin stabilitas kerja, perlindungan sosial, maupun imbalan layak, sehingga memperburuk ketidakpastian finansial individu dan siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Dampak ini menurunkan produktivitas perekonomian lokal, memperparah kemiskinan serta ketimpangan sosial akibat ketidakseimbangan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan, dengan pengangguran struktural serta siklikal yang dipicu fluktuasi ekonomi dan perubahan teknologi (Margahana, 2020). Serta, kondisi tersebut meningkatkan potensi kriminalitas dan masalah sosial seperti konflik domestik, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja pada kelompok berpendidikan rendah tanpa keterampilan relevan, sebagaimana dibuktikan penelitian Astuti et al. (2025) dan Mubarok & Saepudin (2024) yang menegaskan pengangguran sebagai pendorong utama ketidakstabilan sosial di kota besar.

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami tingkat pengangguran signifikan mencapai 6,98% pada 2024 terutama di kalangan lulusan SMA/SMK dan pencari kerja baru, yang menyoroti kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan tersedia akibat dampak sisa pandemi COVID-19 serta dinamika sektor formal dan informal. Sasaran rekomendasi kebijakan mencakup lulusan SMA/SMK, fresh graduates, serta pekerja yang kehilangan

pekerjaan, dengan tujuan mendukung integrasi mereka ke pasar kerja melalui pelatihan, magang, dan kolaborasi erat dengan dunia usaha guna menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Permasalahan pengangguran di Kota Palembang berkaitan erat dengan kerangka regulasi ketenagakerjaan yang telah tersedia, baik di tingkat nasional maupun daerah, namun belum berjalan optimal dalam implementasinya. Regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021, serta Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2019. Pada regulasi nasional lebih menekankan pada aspek perlindungan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta fleksibilitas hubungan kerja, sementara regulasi daerah berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja dan pengaturan prosedur administratif terkait pencari kerja dan perusahaan, namun implementasinya belum efektif menekan pengangguran akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja, serta lemahnya pelatihan dan pemagangan.

Dalam menghadapi tantangan pengangguran di Kota Palembang, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi ini dan mengidentifikasi intervensi kebijakan yang dapat mengurangi angka pengangguran secara efektif. Penelitian Margahana (2020) mengungkapkan bahwa keberhasilan program-program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan untuk menciptakan kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pendidikan, serta pemerintah dalam

penyelenggaraan pelatihan keterampilan (Margahana, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan Nahara (2022) yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri dan analisis berbasis data untuk meminimalisir masalah ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) (Nahara et al. 2022).

Selain itu, penelitian Utami (2023) menunjukkan dampak negatif dari pengangguran, seperti meningkatnya kemiskinan dan potensi kriminalitas, yang memerlukan intervensi kebijakan yang segera dan terintegrasi. Dengan menyoroti pengaruh berbagai kebijakan ketenagakerjaan nasional dan lokal, penting untuk memahami kompleksitas yang terlibat dalam menciptakan solusi yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang (Utami et al, 2023). Dengan demikian, kajian literatur ini tidak hanya memberikan perspektif yang komprehensif tentang penyebab masalah pengangguran, tetapi juga menyarankan perlunya pendekatan yang holistik dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan yang diharapkan oleh dunia industri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengangguran di Kota Palembang (TPT 6,98% tahun 2024), faktor penyebab seperti skill mismatch dan keterbatasan lapangan kerja, serta efektivitas program Ado Gawe. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala UPTD BLK (Pak Efendy) dan stakeholder, dokumentasi (foto job fair, grafik TPT/TPAK, transkrip), serta studi literatur (jurnal seperti Nahara. 2022, regulasi UU No.13/2003, PERDA Sumsel No.6/2019). Sementara itu rekomendasi

kebijakan menggunakan metode perbandingan, (subarsono, 2026) dengan skala likert Patton & Sawicki 1993 untuk evaluasi kriteria yang berisikan efektifitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pernyataan Kebijakan**

Tujuan analisis kebijakan ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Kota Palembang, termasuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,98% pada 2024, kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan industri, serta efektivitas program penempatan kerja yang ada. Untuk mengidentifikasi kendala dan faktor-faktor yang menyebabkan penciptaan lapangan kerja belum optimal, sehingga penyerapan tenaga kerja muda masih rendah. Serta memberikan rekomendasi alternatif kebijakan terbaik dalam mengatasi permasalahan pengangguran struktural, sehingga dapat memperkuat sistem ketenagakerjaan di Kota Palembang menjelang 2026.

Profil kebijakan yang akan dihasilkan dari analisis kebijakan adalah kebijakan yang dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Kebijakan ini fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui perbaikan struktur koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan perbankan, komunitas UMKM dan Start up lokal, serta Dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan ekosistem lapangan kerja yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan TPT secara signifikan dan mendukung pertumbuhan

ekonomi inklusif di Kota Palembang pada tahun 2026.

### **Kriteria Evaluasi**

Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria dari Patton & Sawicki (1993), yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap kriteria dibuat Skala penilaian 1–4. Hal ini dilakukan agar penilaian dapat dilakukan secara objektif. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai kelayakan dari masing-masing alternatif kebijakan agar menghasilkan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi nyata.

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan pengangguran dengan menjawab akar masalah seperti *skill mismatch*, keterbatasan lapangan kerja formal, serta pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi kesempatan kerja. Efektivitas dinilai melalui indikator seperti peningkatan kompetensi peserta, jumlah penempatan kerja yang berhasil, tingkat penciptaan lapangan kerja baru, serta kesesuaian program dengan kebutuhan industri. Penilaian menggunakan skala 1–4 dengan alasan yang jelas: nilai 1 (sangat rendah) diberikan jika kebijakan hampir tidak menghasilkan perubahan dan tidak menasar akar masalah; nilai 2 (rendah) diberikan jika dampak ada tetapi terbatas, tidak konsisten, atau hanya menyelesaikan sebagian kecil dari akar masalah; nilai 3 (tinggi) diberikan jika kebijakan mampu menciptakan dampak nyata seperti peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja yang terukur; sedangkan nilai 4 (sangat tinggi) diberikan jika kebijakan menghasilkan dampak besar, luas, berkelanjutan, serta secara langsung menjawab ketiga akar masalah secara simultan.

Kriteria efisiensi menilai sejauh mana penggunaan anggaran, SDM, waktu, dan fasilitas dapat menghasilkan output berupa peningkatan keterampilan, penyerapan tenaga kerja, atau penciptaan usaha baru. Indikator meliputi biaya per peserta, biaya per lapangan kerja yang tercipta, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, dan penggunaan teknologi yang menekan biaya operasional. Skoring dilakukan dengan skala 1–4: nilai 1 (sangat rendah) diberikan ketika biaya sangat tinggi tetapi hasil sangat kecil, sehingga program boros dan tidak efisien; nilai 2 (rendah) diberikan ketika biaya besar dan hasilnya masih terbatas, nilai 3 (tinggi) diberikan jika biaya sebanding dengan manfaat yang dihasilkan dan program berjalan efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada; sementara nilai 4 (sangat tinggi) diberikan ketika program mampu menciptakan hasil besar dengan biaya relatif kecil melalui optimalisasi fasilitas, teknologi, dan kerja sama lintas sektor.

Kriteria ekuitas bertujuan menilai apakah kebijakan memberikan akses yang adil bagi seluruh kelompok sasaran, terutama lulusan SMA/SMK, *fresh graduate*, perempuan, masyarakat berpendapatan rendah, serta mereka yang tinggal di berbagai kecamatan di Kota Palembang. Indikator meliputi keterjangkauan program, pemerataan peserta, transparansi seleksi, serta keragaman latar belakang peserta. Skala penilaian 1–4 digunakan dengan alasan yang jelas: nilai 1 (sangat rendah) diberikan apabila program hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu dan menimbulkan ketimpangan; nilai 2 (rendah) diberikan ketika akses tersedia tetapi tidak merata, misalnya dominan di wilayah tertentu atau memihak kelompok tertentu; nilai 3 (tinggi) diberikan ketika sebagian besar kelompok sasaran memperoleh akses yang adil, sedangkan nilai 4 (sangat tinggi) diberikan jika program benar-

benar inklusif, tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh kelompok sasaran.

Kelayakan politik menilai tingkat dukungan dari pemerintah daerah, legislatif, pelaku industri, lembaga pendidikan, serta masyarakat terhadap kebijakan. Indikator mencakup dukungan kepala daerah, komitmen anggaran, penerimaan oleh perusahaan atau UMKM, serta kesesuaian dengan RPJMD atau kebijakan strategis daerah lainnya. Skala 1–4 digunakan dengan alasan yang jelas: nilai 1 (sangat rendah) diberikan jika kebijakan tidak mendapat dukungan politik dan berpotensi ditolak atau dihentikan, nilai 2 (rendah) diberikan jika dukungan terbatas hanya dari sebagian kecil pihak, nilai 3 (tinggi) diberikan ketika terdapat dukungan luas dari sebagian besar pemangku kepentingan; sedangkan nilai 4 (sangat tinggi) diberikan jika ada dukungan penuh lintas sektor sehingga kebijakan berpeluang besar berjalan berkelanjutan.

Kelayakan administratif menilai kemampuan lembaga pelaksana dalam menjalankan program secara efektif. Indikator meliputi ketersediaan SDM yang kompeten, kesiapan struktur organisasi, keberadaan SOP yang jelas, kemampuan integrasi data pencari kerja dan lowongan, serta kapasitas monitoring dan evaluasi. Skala penilaian 1–4 digunakan dengan penjelasan: nilai 1 (sangat rendah) diberikan ketika organisasi tidak siap, tidak memiliki struktur jelas, dan sistem data tidak mendukung, nilai 2 (rendah) diberikan apabila kapasitas ada namun masih terbatas, SOP belum lengkap, atau sistem data lemah, nilai 3 (tinggi) diberikan jika lembaga pelaksana memiliki SDM memadai, SOP jelas, dan sistem administrasi berjalan baik, sementara nilai 4 (sangat tinggi) diberikan jika institusi pelaksana sangat siap, memiliki integrasi data yang kuat, sistem *monitoring* optimal, serta mampu

mengelola program secara berkelanjutan.

### **Analisis Alternatif Kebijakan**

Ada 2 kebijakan alternatif yang dirumuskan untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan akar masalah ketenagakerjaan di Kota Palembang, Alternatif pertama berfokus pada peningkatan penyerapan energi kerja melalui Magang Bergaji dan Penempatan Permanen, sedangkan Alternatif kedua berfokus pada pengembangan kewirausahaan melalui penguatan ekosistem UMKM accelerator dan startup di Kota Palembang.

#### **1. Alternatif 1: Magang Bergaji dan Penempatan Permanen**

Magang Bergaji dan Penempatan Permanen dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK dan angkatan kerja baru untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung dengan gaji selama masa magang. Melalui kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan, peserta akan mendapatkan pelatihan serta evaluasi digital. Dalam alternatif ini, perusahaan akan menerima insentif untuk merekrut peserta terbaik sebagai karyawan tetap. Alternatif ini bertujuan untuk mengatasi beberapa akar masalah, termasuk ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, di mana magang bergaji membantu peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, program ini juga mengatasi keterbatasan lapangan kerja formal, memungkinkan peserta memasuki dunia kerja dengan pengalaman yang relevan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, program ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas lapangan kerja dengan menciptakan peluang baru bagi lulusan muda.

Dasar pemilihan alternatif ini menggunakan metode survei cepat yang diambil dari hasil wawancara bersama kak gian (staff BPS kota Palembang). Berdasarkan Hasil Wawancara (Staff BPS), ia menjelaskan bahwa

*“Menurut kakak magang yang mendapat gaji terus langsung di jadikan karyawan tetap di perusahaan, mungkin solusi untuk mengatasi peningkatan pengangguran, karno apo di palembang ini sepengetahuan kakak yo, magang banyak tapi katek benefit, terus caknyo belum ado uong magang langsung biso jadi karyawan tetap, event kerjaan dio bagus di tempat magang itu.”*

#### **2. Alternatif 2: Palembang Startup & UMKM Accelerator**

Alternatif Kebijakan kedua berfokus pada pengembangan UMKM dan startup di Palembang melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan bisnis, pendampingan, penyediaan ruang kerja bersama, dan akses pembiayaan. Pemerintah bekerja sama dengan kampus, inkubator, dan investor untuk menciptakan ekosistem akselerasi terintegrasi yang mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Salah satu akar masalah yang dihadapi adalah ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, yang akan diatasi melalui pelatihan dan mentoring agar peserta dibekali dengan keterampilan relevan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja formal menjadi tantangan, dan program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja mandiri dan berkelanjutan, khususnya di sektor UMKM dan industri kreatif, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja formal. Mengingat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan melalui program ini diharapkan dapat

menghasilkan peluang kerja baru yang selaras dengan pertumbuhan populasi.

Dasar pemilihan alternatif ini menggunakan metode tinjauan pustaka yang mengacu pada penelitian (Helisia Margahana, 2020) dalam jurnal ilmiah manajemen bisnis dan inovasi JMBI, dan (Bram Yudistira, 2023).

Perbandingan kedua alternatif menunjukkan bahwa Program Magang Bergaji dan Penempatan Permanen lebih tepat untuk menjawab kebutuhan penghematan penyerapan energi kerja muda ke pasar kerja formal, sedangkan palembang startup dan UMKM accelerator lebih sesuai untuk mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja baru dan kewirausahaan lokal.

**Tabel 1. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Alternatif kebijakan**

Alternatif Kebijakan	Keuntungan	Kerugian
Program Magang Bergaji dan Penempatan Permanen	Program ini efektif dalam menurunkan pengangguran dengan menyelaraskan kompetensi peserta dengan kebutuhan industri, monitoring real time, dan kolaborasi pemerintah, kampus, serta perusahaan. Secara efisien, program memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem digital untuk mengurangi biaya administratif dan rekrutmen. Dari sisi ekuitas,	Program memiliki kelemahan efektivitas akibat ketergantungan pada koordinasi antar pihak, ketidaksesuaian keterampilan, dan pengalaman magang yang tidak merata. Secara efisiensi, ada investasi awal yang besar, risiko gangguan teknis, dan kebutuhan anggaran untuk insentif. Dalam hal ekuitas, terdapat potensi bias dalam seleksi dan penempatan magang. Selain

	diberikan kesempatan sama tanpa memandang latar belakang dengan evaluasi berbasis kinerja. Program juga memiliki kelayakan politik (dukungan pemerintah) dan administratif (sistem digital terstruktur dan SOP yang jelas).	itu, ada tantangan kelayakan politik (ketidakpastian kebijakan) dan administratif (integrasi data yang tidak stabil dan kapasitas yang berbeda antar instansi).
Palembang Startup & UMKM Accelerator	Program ini efektif dalam memperkuat ekosistem startup dan ekonomi digital melalui mentoring, akses pendanaan, ruang kerja, dan monitoring digital, serta benchmark dari praktik terbaik. Secara efisien, program memanfaatkan fasilitas dan SDM yang ada dengan kolaborasi lintas sektor agar biaya operasional tetap rendah. Dari sisi ekuitas, diberikan kesempatan setara tanpa memandang latar belakang, mendorong inklusivitas untuk pelaku usaha pemula	Program memiliki kelemahan efektivitas akibat ketergantungan pada kesiapan peserta, kualitas mentor yang bervariasi, dan waktu yang lebih lama untuk menciptakan lapangan kerja. Secara efisiensi, ada investasi awal yang besar dengan <i>return on investment</i> hanya terlihat jangka panjang dan ketidakstabilan pendanaan akibat ketergantungan pada sponsor. Dalam hal ekuitas, potensi ketimpangan terjadi jika startup dengan jaringan lebih besar mendapatkan peluang lebih banyak. Selain itu, ada



	dan startup. Program juga memiliki kelayakan politik (meningkatkan citra kota sebagai pusat inovasi) dan administratif (didukung sistem digital, SOP yang terbukti, dan pusat koordinasi teknologi).	tantangan kelayakan politik (intervensi dan perubahan kebijakan) dan administratif (koordinasi lintas instansi yang sulit, sinkronisasi data, dan ketidakstabilan anggaran).
--	--	--

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ini adalah Metode Perbandingan (*Comparative Method*) sebagaimana dijelaskan oleh Subarsono (2006). Bahwa metode ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap alternatif kebijakan berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditentukan, kemudian memilih alternatif dengan nilai total tertinggi sebagai rekomendasi kebijakan yang paling layak. Proses penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1–4, sebagaimana konsep evaluasi kebijakan Patton & Sawicki (1993) yang juga digunakan dalam dokumen ini. Skala tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap alternatif memenuhi lima kriteria evaluasi kebijakan, yaitu: efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif.

Hasil analisis perbandingan kebijakan berdasarkan lima kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif menunjukkan bahwa Alternatif Magang Bergaji dan Penempatan Permanen serta Palembang Startup & UMKM Accelerator memperoleh total skor yang sama, yaitu 17 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua alternatif sama-sama memiliki tingkat kelayakan yang setara untuk

diterapkan. Namun demikian, masing-masing alternatif memiliki fokus keunggulan yang berbeda, terutama jika dilihat dari tujuan dan jangka waktu pencapaian dampaknya.

**Tabel 2. Tabel Perbandingan Alternatif Kebijakan**

KRITERIA EVALUASI	Alternatif Kebijakan	
	Program Magang Bergaji dan Penempatan Permanen	Palembang Startup dan UMKM
Efektivitas	4	3
Efisiensi	3	3
Ekuitas	4	4
Kelayakan Politik	3	3
Kelayakan administratif	3	4
Jumlah Nilai	17	17

Alternatif kebijakan Magang Bergaji dan Penempatan Permanen memiliki kelebihan utama pada aspek dampak langsung dan kecepatan hasil, karena mampu segera menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri melalui skema magang berbayar yang berpotensi berlanjut pada penempatan kerja permanen. Walaupun alternatif ini masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi biaya dan kesiapan administratif, kemampuannya dalam menurunkan tingkat pengangguran secara cepat menjadikannya lebih tepat diprioritaskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menjawab permasalahan pengangguran di Kota Palembang.

Sebaliknya, Palembang Startup & UMKM Accelerator lebih unggul pada aspek efisiensi dan kesiapan administrasi, karena pelaksanaannya didukung oleh pemanfaatan jejaring mitra, infrastruktur digital, serta sistem pendampingan yang relatif mapan. Namun, kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran cenderung bersifat bertahap dan tidak langsung,



mengingat penciptaan lapangan kerja sangat bergantung pada keberhasilan dan pertumbuhan usaha peserta program. Oleh karena itu, alternatif ini lebih sesuai diarahkan sebagai kebijakan jangka panjang dalam rangka membangun ekosistem kewirausahaan dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Dengan demikian, meskipun kedua alternatif memperoleh skor akhir yang sama, penetapan prioritas kebijakan didasarkan pada urgensi tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks kebutuhan mendesak untuk menekan angka pengangguran dalam waktu dekat, Alternatif Magang Bergaji dan Penempatan Permanen perlu diutamakan sebagai kebijakan utama, sedangkan Palembang Startup & UMKM Accelerator berperan sebagai kebijakan pelengkap jangka panjang guna memastikan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja di Kota Palembang.

## SIMPULAN

Pengangguran di Kota Palembang masih menjadi permasalahan struktural yang signifikan, khususnya di kalangan lulusan SMA/SMK dan angkatan kerja muda, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6,98% pada tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, keterbatasan lapangan kerja formal, serta belum optimalnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Dampak dari permasalahan tersebut tidak hanya menurunkan produktivitas ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan ketergantungan pada sektor informal serta risiko masalah sosial, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis analisis komprehensif.

Hasil analisis alternatif kebijakan menunjukkan bahwa alternatif Magang Bergaji dan Penempatan Permanen serta Palembang Startup &

UMKM Accelerator sama-sama layak diterapkan dengan skor evaluasi yang setara, namun memiliki orientasi dampak yang berbeda. Program magang bergaji lebih efektif sebagai kebijakan jangka pendek karena mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan pengangguran melalui peningkatan pengalaman kerja dan penempatan tenaga kerja formal. Sementara itu, penguatan ekosistem startup dan UMKM lebih tepat sebagai kebijakan jangka panjang untuk mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Oleh karena itu, prioritas kebijakan perlu disesuaikan dengan urgensi penanganan pengangguran, dengan tetap mengintegrasikan kedua alternatif guna memperkuat sistem ketenagakerjaan dan daya saing ekonomi Kota Palembang menuju tahun 2026.

## DAFTAR PUSTAKA

Astuti, A. W., Hasibuan, Z. H., Harahap, P. N., Simanjuntak, T. F. B., Zuhriadi, M., Hasanah, I., Syahrani, D., & Pratama, L. S. (2025). Pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas dengan kemiskinan sebagai variabel intervening di Indonesia. *Jurnal TAMBORA*, 9(1), 135–142.

<https://doi.org/10.36761/tambora.v9i1.5111>

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, (2024).

<https://palembangkota.bps.go.id/id/pressreleases/2024/12/16/1242/keadaan-ketenagakerjaan-kota-palembang-agustus-2024.html>

Darmawan, A. D. (2025). Persentase pengangguran 2024 di Kota Palembang 6,98%. DataboksKatadata.

<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6ef0b371a0b61af/persentase-pengangguran-2024-di-kota-palembang-6-98>

Margahana, H. (2020). Pengaruh Entrepreneurship Terhadap Penanggulangan Pengangguran Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Palembang. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(2).

<https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i3.30292>

Mubarok, M. I. G., & Saepudin, T. (2024). Analisis pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas: studi pada 13 kota besar di Indonesia tahun 2015–2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi (JRIE)*, 3(2), 101–117. <https://doi.org/10.23969/jrie.v3i2.68>

Nahara, Y., Mawaddah, P., Maharani, F. L., & Panorama, M. (2022). Determinan Tingkat Pengangguran Di Kota Palembang Dan Alternatif Kebijakan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1629-1636. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/216/198>

Patton, C. dan Sawicki, D. (1993) *Metode Dasar Analisis dan Perencanaan Kebijakan*. Prentice-Hall, Upper Saddle River.

Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Surabaya: Unesa University Press.

Subarsono, A.G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education. [https://books.google.co.id/books?hl=id&id=m8kMk\\_KbSX4C](https://books.google.co.id/books?hl=id&id=m8kMk_KbSX4C)

Utami, T., Riska, N., Afifah, A. P., Firmansyah, F., Albar, M. D., & Prasetyo, M. D. (2023). The impact of unemployment and poverty on economic growth in the City of Palembang. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(1), 137-147.

Yudistira, B. (2023). Implementasi Program Bantuan UMKM dalam Menjalankan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 107-120. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i2.157>